

JUGUN IANFU: KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN PADA MASA PENDUDUKAN JEPANG DI JAWA BARAT TAHUN 1942-1945

Astrid Dwi Rahma¹, Suswandari², Hari Naredi³

astrid@gmail.com

Abstract

This study aims to determine and obtain a comprehensive picture of how the activities of Jugun Ianfu in West Java, forms of violence against Jugun Ianfu, legal protection and accountability of Japan, and the social-psychological impact of victims of Jugun Ianfu in West Java. The research methodology used is the historical research method which consists of four steps, namely heuristics, criticism, interpretation, and historiography. The results showed that the recruitment process of Jugun Ianfu was carried out in areas in West Java such as Cimahi, Sukabumi, Bogor and Sumedang through kidnapping and promised to be employed. Based on the exposure of the victims of Jugun Ianfu, they often accept sexual violence that was both perpetrated by the Japanese Army and its Officers. So, it can be concluded that the Japanese Army has committed rape, trafficking in persons for sexual purposes, social exploitation, sexual torture and also sexual slavery of adolescent women in West Java and has a traumatic impact on those who experience it both physically, the impact on society and also the psychological victim Jugun Ianfu.

Keywords: *Jugun Ianfu, Violence, Japanese Occupation.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh gambaran secara menyeluruh bagaimana aktivitas *Jugun Ianfu* di Jawa Barat, bentuk-bentuk kekerasan terhadap *Jugun Ianfu*, perlindungan hukum dan pertanggungjawaban Jepang, serta dampak sosial-psikologis korban *Jugun Ianfu* di Jawa Barat. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode penelitian sejarah yang terdiri dari empat langkah, yakni heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perekrutan *Jugun Ianfu* dilakukan di daerah-daerah di Jawa Barat seperti Cimahi, Sukabumi, Bogor, dan Sumedang melalui penculikan dan dijanjikan akan dipekerjakan. Berdasarkan pemaparan para korban *Jugun Ianfu*, mereka seringkali menerima kekerasan-kekerasan seksual yang baik itu dilakukan oleh Tentara Jepang maupun para Perwiranya. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa Tentara Jepang sudah melakukan perkosaan, perdagangan orang untuk tujuan seksual, eksploitasi sosial, penyiksaan seksual dan juga perbudakan seksual terhadap perempuan-perempuan remaja di Jawa Barat dan memberikan dampak traumatis bagi mereka yang mengalaminya baik itu secara fisik, dampak terhadap masyarakat dan juga psikologis korban *Jugun Ianfu* tersebut.

Kata Kunci : Jugun Ianfu, Kekerasan, Pendudukan Jepang.

¹ Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

² Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

³ Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap perempuan dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia seperti bagian yang tidak bisa dipisahkan. Perempuan diperbudak dan dijadikan target sasaran dalam situasi yang amat mengerikan tanpa mereka pernah ketahui. Perempuan sudah lama ditempatkan sebagai objek dalam konflik bersenjata, perebutan kekuasaan, ataupun agresi (Subono, 2000: 238). Salah satu periode saat kedudukan kaum perempuan dibungkam dan menjadi korban, yaitu pada masa pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942-1945. Terjadi eksploitasi besar-besaran terhadap perempuan dijadikan budak, dan juga pelacur bagi para tentara. Perempuan direduksi sebagai tubuh dan objek seksual para laki-laki. Mereka diperlakukan sebagai barang, para perempuan pun sering menerima perlakuan kekerasan. Mereka hanya dianggap sebagai perempuan rendahan bagi laki-laki.

Dalam masa pendudukannya, Jepang menerapkan beberapa sistem untuk memobilisasi rakyat Indonesia, salah satunya adalah "Sistem Perbudakan Seksual Militer Jepang" yang merupakan mekanisme dengan cara paksa menyediakan perempuan-perempuan sebagai sarana praktek seksual untuk para tentara Jepang di semua wilayah pendudukan Jepang di Indonesia. Kekaisaran Jepang menamai perempuan-perempuan dalam sistem ini dengan sebutan *Jugun Ianfu*. Dalam menjalankan sistem *Jugun Ianfu*, terdapat kebijakan dalam pengelolaan hiburan dalam ketentaraan, yang diatur oleh Pusat Komando Tentara, Kerajaan Jepang juga mengetahui hal tersebut. Hiburan seksual juga diatur secara terpusat, terutama bila tentaranya sudah berada di barak-barak dan memerlukan wanita sebagai hiburan. Pada saat Jepang masuk ke pulau Jawa, mereka memerlukan wanita-wanita yang bisa dipakai untuk hiburan (Suryono, 2005: 262).

Keberadaan *Jugun Ianfu* di Jawa Barat ini dibuktikan dengan adanya testimoni-testimoni korban *Jugun Ianfu* yang berasal di Jawa Barat yaitu di daerah Cimahi, Sukabumi, Bogor, dan Sumedang dan juga ditemukannya lanjo di kota Cimahi serta Gedung Kipers di Sukabumi, sehingga tempat-tempat tersebut menjadi saksi sejarah kekerasan dan perbudakan seksual terhadap perempuan pernah terjadi di Jawa Barat. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti ingin mengangkat masalah tersebut dan membuat suatu penelitian tentang *Jugun Ianfu* dan kekerasan yang mereka alami di Indonesia khususnya di wilayah Jawa Barat. Karena sampai saat ini belum banyak yang melakukan penelitian tentang keberadaan *Jugun Ianfu* di daerah tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan penderitaan yang dialami para perempuan dan juga menjelaskan bahwa *Jugun Ianfu* merupakan salah satu bagian dari kelamnya sejarah Indonesia serta menjadi saksi bagaimana negara gagal melindungi warganya, khususnya perempuan.

Berdasarkan uraian yang sudah dikemukakan pada latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan masalah diatas, maka peneliti merumuskan permasalahannya pada, "Bagaimana Jugun lanfu: Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Pada Masa Pendudukan Jepang Tahun 1942-1945 di Jawa Barat?". Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk membahas Jugun lanfu di Jawa Barat selama Pendudukan Jepang, untuk menganalisis kekerasan seksual yang dilakukan oleh Jepang terhadap korban Jugun lanfu di Jawa Barat, untuk menganalisis dampak sosial-psikologis yang dialami korban Jugun lanfu di Jawa Barat.

Masyarakat Jepang merupakan masyarakat yang tersusun sangat terintegrasi dan hirarkis (vertikal). Dalam kehidupan kelompok atau organisasi, nilai-nilai yang dianut adalah dominasi kehidupan laki-laki dan mengabaikan kehidupan perempuan. Jepang juga mempunyai sistem tersendiri dalam pranata masyarakatnya. Sistem pranata masyarakat Jepang yang cukup dikenal adalah sistem *ie*. (Fukutake. 1988: 37) Sistem ini dibuat untuk mengatur tatanan masyarakat misalnya dari tingkat yang terendah yakni keluarga. Dalam keluarga, *ie* dipimpin oleh seorang kepala keluarga (laki-laki). Sedangkan untuk perempuan sepanjang hidupnya harus selalu tunduk pada laki-laki. Perempuan Jepang yang sepanjang hidupnya harus selalu tunduk pada laki-laki. Pertama pada ayahnya, kemudian setelah menikah pada suaminya, dan setelah anaknya dewasa kepada anak laki-lakinya yang menduduki kepala keluarga (Wulandari & Rahayu, 2015: 179-180).

Masyarakat Jepang harus menempatkan diri sesuai dengan hirarki. Kepala keluarga merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dan anak laki-laki pertama merupakan pewaris utama dan penerus keluarga (Rahmah, 2017: 42). Di dalam masyarakat Jepang, meskipun sudah menikah biasanya seorang suami masih diperbolehkan mencari kesenangan biologisnya di tempat yang lain tanpa harus sembunyi. Mereka diijinkan memelihara seorang pelacur baik di dalam maupun di luar rumah, sepanjang dia tidak melalaikan kewajibannya kepada keluarganya, sementara seorang istri harus setia kepada suami dan membiarkan suaminya berbuat yang menyenangkan hatinya (Roosiani, 2017: 75).

Sistem ini mempengaruhi seluruh aspek kehidupan orang Jepang, mulai dari kehidupan sehari-hari, perkawinan, cara berpikir bahkan semua aktivitas pekerjaan sangat terikat dan tidak bisa dipisahkan dari struktur *ie*. Anwar. (2007: 197) Sehingga *ie* yang hidup dalam masyarakat Jepang merupakan bentuk gender role yang terlahir karena adanya stereotip laki-laki dan perempuan dan diperkuat dengan keyakinan yang berkembang di Jepang dimana keyakinan tersebut menempatkan kedudukan perempuan sebagai inferior.

Para Tentara Jepang yang dipengaruhi sistem feodal, ketika datang menduduki Jawa bertemu dengan sistem feodal. Pengertian feodal itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merupakan hubungan dengan susunan masyarakat yang dikuasai oleh kaum bangsawan (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1996: 275) Sistem feodal ini tidak hanya membuat suatu stratifikasi sosial dalam masyarakat Jawa dengan membedakan status Priyayi dan rakyat biasa, juga membuat suatu stratifikasi gender dengan membedakan kedudukan perempuan dan laki-laki (Irawati. 2016: 111) Perempuan harus berhadapan dengan dengan kultur Jawa feodal yang menempatkan perempuan hanya sebagai konco wingking, yaitu hanya berurusan dengan kasur, sumur, dan dapur untuk menegaskan peran domestik mereka (Susanto (ed). 2007: 118). Dalam tradisi militer Jepang, tentara akan dihukum minimal 7 tahun penjara jika mereka ketahuan melakukan perkosaan. Namun tetap saja tentara Jepang karena mereka menganggap bahwa negara yang dijajah berstatus rendah. Maka melakukan perkosaan adalah tindakan yang wajar, sama halnya dengan bertempur (Hindra & Kimura. 2007: 218).

Gender adalah konstruksi sosial, bukan sesuatu yang bersifat biologis (Zubaedah. 2010: 246). Mengutip pernyataan West dan Zimmerman tentang pengertian gender:

“... Gender as a routine, methodical, and recurring accomplishment. We contend that the "doing" of gender is undertaken by women and men whose competence as members of society is hostage to its production. Doing gender involves a complex of socially guided perceptual, interactional, and micropolitical activities that cast particular pursuits as expressions of masculine and feminine "natures"”. (West and Zimmerman. 1987: 126).

Gender diartikan sebagai konstruksi sosial kultural yang membedakan karakteristik maskulin dan feminin. konstruksi sosial hadir untuk menjelaskan kecenderungan tersebut dengan cara melihat realitas sebagai sesuatu yang dibentuk secara sosial. Dalam hal ini konstruksi sosial menekankan tentang bagaimana realitas keadaan dan pengalaman mengenai sesuatu diketahui atau diinterpretasikan melalui aktivitas social (Abdullah. 2013: 266).

Dalam memahami konstruksi sosial terhadap perempuan dalam masyarakat Indonesia masa pendudukan Jepang, peneliti menggunakan teori konstruksi sosial Berger dan Luckmann yang dalam Bungin menjelaskan, bahwa masyarakat tercipta dan dipertahankan atau diubah melalui tindakan dan interaksi manusia (laki-laki dan perempuan). Adanya proses dialektika antara individu menciptakan masyarakat dan masyarakat menciptakan individu sehingga salah satunya membentuk peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Proses dialektika ini terjadi melalui eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi (Bungin. 2008: 15).

Fasisme merupakan ideologi nasionalisme dan agresif yang didasarkan pada rasisme yang sama sekali berbeda dari hanya sekedar kecintaan pada negaranya. Dalam nasionalisme agresif pada fasisme, seseorang mencita-citakan bangasanya menguasai bangsa lain, menghina dan tidak menyesali timbulnya penderitaan terhadap rakyat. Selain itu, juga menggunakan peperangan, pendudukan, pembantaian dan pertumpahan darah sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan politis tersebut (Yahya. 2004: 5).

Konsep negara fasis khususnya di Jepang, berpijak pada kekuasaan kekaisaran Jepang yang diyakini sebagai wadah kehendak, cita-cita, dan identitas nasional. Kuatnya transisi militer juga ikut menyuburkan pergerakan fasisme di Jepang dan mendorong mereka kembali pada tradisi samurai yang menggelorakan budaya dan tradisi Jepang kuno (Purcell, 2014: ix-x).

Di dalam sebuah negara fasis, kedudukan perempuan hanya dipandang sebagai objek yang merupakan bentuk yang paling real dalam melakukan penundukan atas suatu bangsa. Hal ini sebagaimana yang terjadi ketika Jepang melakukan pengerahan perempuan Indonesia sebagai bagian dari wujud penundukan wilayah dengan memasukkan beratus-ratus perempuan dalam ianjo dalam membuat sistem Jugun Ianfu (Mariana. 2015: 18-19).

METODE

Sebagai studi sejarah, penelitian ini menggunakan metodologi dengan melalui beberapa tahapan antara lain: Heuristik, Kritik Sumber, Interpretasi, dan Historiografi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik deskriptif analisis, yaitu suatu penulisan sejarah yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena atau peristiwa masa lalu, yang kemudian dicari sebab akibatnya dan disajikan dalam bentuk narasi. Penulisan diawali dengan pemaparan bagaimana Jepang menduduki Jawa Barat. Kemudian, diiringi dengan persinggungan pemikiran mengenai sejarah dan sistem jugun ianfu di Indonesia. Selanjutnya, peneliti membahas bagaimana sejarah jugun ianfu di Jawa Barat.

Dalam penelitian historis, terdapat suatu tahap pencarian dan pengumpulan data yang disebut heuristik. Heuristik berasal dari kata Yunani, yaitu heurishein yang berarti memperoleh. Heuristik adalah suatu keterampilan dalam menemukan, menangani, memperoleh atau mengklasifikasikan dan merawat catatan (Abdurahman. 2011: 104). Peneliti mengumpulkan sumber dari perpustakaan-perpustakaan dan lebih banyak menggunakan sumber data sekunder. Karena, selama penelaahan peneliti, belum ada referensi yang valid atau dekat masa pembuatannya dengan sistem Jugun Ianfu berlaku. Karena itu, sumber yang

digunakan peneliti adalah sumber yang berasal dari testimoni-testimoni peneliti lain yang ditulis dalam sebuah monograf, jurnal, dan analisis data penelitian.

Dalam mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkan data dengan melakukan wawancara langsung kepada informan, yang dilakukan untuk menghimpun data dengan melakukan tanya-jawab lisan secara tatap muka dengan siapa saja yang dikehendaki yang merupakan pelaku maupun saksi sejarah. Tetapi dalam penelitian ini, peneliti tidak menemukan narasumber untuk data primer dikarenakan para korban Jugun Ianfu khususnya di Jawa Barat sudah meninggal dunia dan orang-orang yang mengetahui peristiwa ini sudah tidak bisa ditemukan oleh peneliti.

Setelah sumber sejarah tersebut terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah melakukan verifikasi atau biasa disebut juga dengan kritik yang bertujuan untuk memperoleh keabsahan sumber.³⁶ Dalam hal ini, peneliti melakukan uji keabsahan mengenai otentitas buku referensi baik dengan kritik ekstern, maupun intern. Secara eksternal sumber-sumber yang dipakai oleh peneliti yang merupakan sumber sekunder dengan bentuk fisik yang masih dalam keadaan baik dan terjaga secara halaman maupun penjilidannya.

Interpretasi adalah menguraikan fakta-fakta sejarah dengan menggabungkan fakta-fakta tersebut sehingga membentuk cerita peristiwa sejarah (Madji dan Johan Wahyudi. 2014: 225) Dalam prosesnya, peneliti harus dapat memahami faktor yang menyebabkan terjadinya suatu peristiwa. Oleh karenanya, interpretasi dapat dilakukan dengan cara membandingkan data-data untuk mengungkap peristiwa-peristiwa mana yang terjadi dalam waktu yang sama. Jadi, untuk mengetahui sebab-sebab dalam peristiwa kesejarahan memerlukan pengetahuan tentang masa lalu sehingga pada saat penelitian, peneliti akan dapat memahami situasi pelaku, tindakan, dan tempat peristiwa.

Fase terakhir dalam metode historis adalah historiografi. Historiografi merupakan cara penulisan, pemaparan atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan. Selayaknya laporan penelitian ilmiah, penulisan hasil penelitian sejarah hendaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses penelitian dari awal hingga akhir. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik deskriptif analisis, yaitu suatu penulisan sejarah yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena atau peristiwa masa lalu, yang kemudian dicari sebab akibatnya dan disajikan dalam bentuk narasi. Penulisan diawali dengan pemaparan bagaimana Jepang menduduki Jawa Barat. Kemudian, diiringi dengan persinggungan pemikiran mengenai sejarah dan sistem jugun ianfu di Indonesia. Selanjutnya, peneliti membahas bagaimana sejarah jugun ianfu di Jawa Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam rangka untuk menyatukan Asia di bawah pimpinan Jepang, secara tiba-tiba pada 7 Desember 1941, pasukan udara Jepang melancarkan serangan ke pangkalan angkatan laut Amerika Serikat di Pearl Harbour, Hawai. Sejak peristiwa tersebut, Amerika Serikat dan sekutunya termasuk Belanda menyatakan perang terhadap Jepang. Pada 18 Desember 1941, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Jenderal Tjarda van Starckenborgh Stachouwer melalui radio resmi menyatakan perang terhadap Jepang (Onghokham. 1989: 163-165).

Jepang mulai mengadakan penyerbuan secara besar-besaran ke wilayah Indonesia tidak terkecuali daerah Jawa Barat. Jawa Barat merupakan daerah vital bagi kolonial Belanda. Karena secara geografis kota Batavia (pusat pemerintahan Hindia Belanda), terletak disana. Selain itu di Jawa Barat dipusatkan kubu-kubu pertahanan Belanda. Terdapat Departement van Oorlog atau kementerian peperangan, gudang perbekalan dan bengkel senjata serta keadaan medannya memberikan kemungkinan untuk mengadakan perlawanan dalam waktu lama (Depdikbud. 1977: 186).

Pada hari yang sama Jepang berhasil menduduki Subang dimana Batalyon Wakamatsu dapat merebut lapangan Kalijati tanpa perlawanan berarti dari angkatan udara Inggris yang menjaga lapangan terbang tersebut. Pada tanggal 2 hingga 4 maret 1942, Belanda berusaha merebut kembali Kalijati tetapi mengalami kegagalan (Lubis, N, dkk. 2014: 234). Pada 5 Maret 1942 seluruh detasemen tentara Jepang yang ada di Kalijati disiapkan untuk menggempur pertahanan Belanda di Ciater dan selanjutnya menyerbu Bandung. Akibat gempuran Tentara Jepang, tentara kolonial Belanda yang berada di Ciater mundur ke Lembang, Bandung. Pada 6 Maret 1942, Panglima Angkatan Darat Belanda, Letnan Jenderal Ter Poorten memerintahkan komandan pertahanan Bandung Mayor Jend. J.J. Pesman agar tidak mengadakan pertempuran di Bandung dan menyarankan mengadakan perundingan mengenai penyerahan pasukan yang berada di antara garis Utara-Selatan yang melalui Purwakarta, dan Sumedang (Poesponegoro, dkk. 2005: 8-9).

Pada tanggal 8 Maret 1942, Perintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat dalam perundingan di Kalijati, Subang (Sofianto. 2001: 65). Dalam menjalankan kebijaksanaan pemerintahan, Jepang memegang pada tiga prinsip utama, yaitu pertama, mengusahakan agar mendapat dukungan rakyat untuk memenangkan perang dan mempertahankan ketertiban umum. Kedua, memanfaatkan sebanyak mungkin struktur pemerintahan yang telah ada, dan yang ketiga, meletakkan dasar

agar wilayah yang bersangkutan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri (Lapian & Chaniago, 1998: 2).

Tugas yang ditanggung Lurah pada masa pendudukan Jepang juga sangat penting, Lurah mempunyai tanggung jawab dalam menagih pajak, mempertinggi taraf hidup rakyat, memimpin organisasi-organisasi semi militer yang dibuat oleh Jepang, memilih dan mengangkat para pemilih untuk dewan penasehat lokal, mengurus keuangan desa, dan kas mesjid, menjaga keamanan desa, serta memberi penerangan kepada masyarakat baik tingkat atas maupun tingkat bawah.

Pada tingkat yang paling bawah dalam sistem pemerintahan Jepang membentuk Tonarigumi.¹¹ Sistem ini mengikuti organisasi yang serupa di Jepang yang dibentuk beberapa tahun sebelum Perang Dunia II dalam rangka pembinaan ketahanan rakyat sewaktu mereka sedang menghadapi perang dengan Cina. Tonarigumi ditugaskan untuk membantu dalam usaha perbaikan kesehatan sampai pada tingkat keluarga, meningkatkan hubungan antara berbagai kelompok masyarakat, menganjurkan penduduk agar menabung, menyelenggarakan ronda malam, menaikkan hasil pertanian, dan membantu keluarga tentara yang kesulitan.

Dengan sistem tonarigumi, tak seorang pun yang tidak terdaftar dalam tonarigumi. Setiap kepala rumah tangga diwajibkan melaporkan setiap pendatang yang menginap di rumahnya kepada Kumicho dan secara berkala Kumicho melaporkan keluar masuk penduduk dalam wilayah kekuasaannya kepada Kuco (kepala desa). Dengan sistem itu Pemerintah Tentara Jepang berhasil menciptakan kontrol yang sangat efektif dan juga kegunaannya terasa sangat cepat. Pengawasan terhadap bahan makanan dan kebutuhan rakyat berjalan lancar, demikian juga pengawasan terhadap kewajiban romusha dan keamanan setempat. Dengan sistem itu, Pemerintah Tentara Jepang berhasil mencegah kemungkinan penyusupan tentara Sekutu. Secara otomatis, adanya tonarigumi di Jawa Barat dapat terawasi dengan baik (Sofianto, 2001: 72).

Semua rakyat yang mempunyai radio harus mendaftarkan di tempat-tempat dan waktu yang ditentukan dalam Maklumat Kantor Besar pemerintahan Dai Nippon. Radio tersebut harus di bawah ke kantor wedanan setempat untuk disegel. Tujuannya agar rakyat tidak mendengarkan berita dari luar negeri, terutama berita yang menyangkut kedudukan Jepang dalam perang disegel. Tujuannya agar rakyat tidak mendengarkan berita dari luar negeri, terutama berita yang menyangkut kedudukan Jepang dalam perang (Mikhrob & Khudari, 1993: 220).

Di antara peraturan-peraturan yang dibuat oleh Jepang, yang paling ditentang oleh masyarakat khususnya pada umat Islam adalah kewajiban melakukan seikerei atau pemberian hormat setiap pagi bersikap membungkuk atau menundukan kepala

kearah Tokyo untuk memberi hormat kepada Kaisar Jepang. Alasan para ulama untuk menentang peraturan tersebut karena dianggap syirik, seperti perbuatan menyembah berhala dan menyamakan kaisar Jepang dengan Tuhan (Oktorino. 2013: 53).

Pemerintahan Jepang dalam menjalankan politiknya mendirikan suatu gerakan yang dikenal dengan nama Gerakan Tiga A. Gerakan ini, merupakan organisasi politik propaganda tentara Jepang, terkenal dengan tiga semboyannya yang mengagung-agungkan Jepang, yakni Nippon pemimpin Asia, Nippon pelindung Asia, dan Nippon cahaya Asia. Gerakan ini oleh sebagian para pemuda dianggap sebagai datangnya angin segar mengingat pada masa penjajahan Belanda sangat sarat dengan kehidupan yang diskriminatif. Dilain pihak mengingat antusiasme para pemuda, maka program pelajaran yang diberikan pada para anggotanya khususnya yang berasal dari Indonesia ditekankan pada upaya menanamkan semangat (seishin) sehingga diharapkan mampu menumbuhkan jiwa kesatria (bushido). Secara langsung maupun tidak langsung, ternyata upaya penanaman semangat kesatria ini menimbulkan semangat “ke-Indonesia-an” pada diri para pemuda, bahkan pada akhirnya menjadi bumerang bagi Jepang (Legawa. 2009: 32).

Masa pendudukan Jepang, Maret 1942 - Agustus 1945 merupakan masa yang hidup dalam kesusahan. Sandang dan pangan merupakan hal sumber penderitaan yang tidak ada habisnya. Rakyat Indonesia untuk dapat makan sepiring nasi sangat sulit. Setiap hari orang mati kelaparan di pinggir jalan, pasar, dibawah jembatan. Di desa-desa petani tidak berhak atas panen, banyak juga yang melakukan kerja paksa di luar desanya dan tidak pernah bisa kembali kepada keluarga karena tewas di rantauan. Seluruh lapisan masyarakat hidup dalam kekurangan. Benda-benda berharga yang masih layak di jual akhirnya terpaksa jatuh ke tangan pedagang. Pada masa pemerintahan Jepang, golongan pedagang kehidupannya jauh lebih baik dibanding golongan lainnya.

Jepang mengambil seluruh potensi sumber daya alam dan bahan mentah untuk Industri yang mendukung mesin perang. Jepang menyita seluruh hasil perkebunan, pabrik, bank, dan perusahaan penting. Banyak lahan petani yang terbengkalai akibat titik berat kebijakan difokuskan pada ekonomi dan industri perang. Kondisi tersebut menyebabkan produksi pangan menurun dan kelaparan serta kemiskinan meningkat drastis. Jepang menerapkan sistem pengawasan ekonomi secara ketat dengan sanksi pelanggaran yang sangat berat. Beberapa tindakan yang di ambil adalah pengawasan pada penggunaan dan peredaran sisa-sisa persediaan barang. Pengendalian harga perkebunan teh, kopi, karet, tebu, dan sekaligus memonopoli penjualannya, pembatasan teh, kopi, tebu, dan tembakau, karena tidak langsung

berkaitan dengan kebutuhan perang, serta monopoli tebu dan gula (Isnaeni & Apid. 2008: 37).

Memang tujuan pemerintah militer Jepang menduduki dan menguasai Indonesia adalah untuk mendapatkan bahan baku guna memenuhi kebutuhan perang. Sasaran utama dari eksploitasi Indonesia adalah hasil-hasil pertanian dan tenaga kerja. Pedesaan Jawa dengan tanahnya yang subur dan penduduknya yang banyak, dianggap mempunyai potensi ekonomi yang luar biasa. Oleh karena itu Jepang berusaha mengeksploitasinya ekonomi rakyat melalui kontrol secara intensif di pulau Jawa. Untuk memenuhi kepentingannya, pemerintah militer Jepang melakukan penekanan dan kekerasan. Tindakan ini juga diikuti dengan sanksi dan hukuman bagi orang yang berani melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Kurasawa. 2015: 3).

Jawa sebagai daerah penghasil padi terbesar di wilayah Indonesia ditetapkan sebagai wilayah pemasok padi untuk pulau-pulau luar Jawa serta medan pertempuran di Pasifik Selatan. Pemerintah militer Jepang yang terdiri dari para pejabat tinggi anggota serdadu, dan orang-orang sipil dari Jepang sangat membutuhkan padi guna memenuhi kebutuhan pangan mereka selama menduduki Indonesia (Lucas, 1989: 39).

Pulau Jawa juga harus menyediakan kebutuhan beras untuk tentara yang berada diluar Jawa. Disamping itu masih harus menyediakan kebutuhan beras untuk para tawanan Belanda dan sekutu yang tersebar di nusantara, serta untuk 74.000 tentara Jepang di Jawa itu sendiri. Dalam perhitungan, tiap tentara Jepang memerlukan 640 gram nasi dalam satu hari. Sedangkan untuk semi militer Jepang (Heiho, PETA dan Romusha), perhitungannya hanya 200 hingga 300 gram nasi untuk satu orang dalam satu hari (Suryono, 2005: 313).

Kebutuhan yang besar terhadap tersedianya bahan pangan, terutama padi, mengharuskan pemerintah Jepang mengeksploitasi produksi padi dari para petani. Eksploitasi tersebut berupa kebijakan yang mengharuskan petani untuk menyerahkan hasil produksi tersebut kepada pemerintah Jepang. Beberapa peraturan pun muncul untuk mendukung kebijakan penyerahan padi. Jepang membentuk Badan Pengelolaan Pangan atau Shokuryo Kanri Zimusyo untuk melakukan proses penyerahan dan penyaluran padi. Selain itu juga badan ini bertugas dalam penetapan kuota padi, penetapan harga gabah dan beras (Nagazumi, 1988: 87-88).

Padi yang diserahkan oleh petani kepada Jepang dibayar sesuai dengan harga yang telah ditetapkan. Harga padi ditentukan dengan nilai uang yang sangat rendah dan dibayar dengan uang kertas yang dicetak sendiri oleh pemerintah Jepang

(Ibrahim. 2004: 38). Oleh karena itu, dengan adanya eksploitasi sumber daya alam, petani dan masyarakat Indonesia mengalami kesengsaraan akibat kekurangan padi di daerahnya, termasuk di Jawa Barat. Sukabumi misalnya, masyarakat harus melaksanakan wajib serah padi sekitar 30 hingga 50 persen dari hasil produksi.

kepada pemerintah (Sulasman, 2013: 440) di Garut, masyarakat diwajibkan mengumpulkan hasil bumi yakni padi, jagung, dan juga buah-buahan. Petani harus menanam tanaman sesuai dengan ketentuan pemerintah Jepang dan hasilnya diserahkan untuk kepentingan peperangan, selain itu juga tanah-tanah yang kosong harus ditanami dengan pohon jarak yang nantinya akan digunakan untuk menjadi minyak pelumas dalam menjalankan mesin-mesin kendaraan tentara Jepang yang bertempur. Hal tersebut juga dirasakan masyarakat Indramayu, sebagian besar hasil panen diambil paksa oleh Jepang, sehingga kekurangan sandang dan pangan. Di sepanjang jalan tampak pemandangan yang mengerikan, banyak tulang kerangka yang bergelimpangan, dan masyarakat hanya memakai pakaian dengan karung goni, sebagai pakaian sehari-hari. Selain hasil bumi sebanyak 200 gram untuk makan seorang sehari dan 20 kg untuk bibit per hektar, semua hasil bumi harus diserahkan kepada Jepang (Iryana, 2016: 291).

Masyarakat Jawa Barat (sunda) memiliki struktur kekerabatan yang bersifat bilateral, artinya laki-laki dan perempuan mempunyai kewajiban dan hak yang sama dalam. Semua anak, baik laki-laki maupun perempuan mendapat hak waris. Namun faktanya, terjadi pula perbedaan perlakuan, dalam hal ini perempuan selalu ditempatkan dibawah laki-laki.³⁵ Terjadi marginalisasi kedudukan perempuan dalam konstalasi budaya sunda karena dipengaruhi oleh perjalanan masyarakat Jawa Barat sendiri yang harus mengalami penjajahan oleh Jepang yang jelas memberikan warna tersendiri dalam alam pikir mereka. Masyarakat Jawa Barat yang awalnya menjunjung kedudukan perempuan harus tergerus oleh kebudayaan asing yang menempatkan dominasi kaum laki-laki atasnya (Marlina, 2006: 189).

Religi merupakan salah satu bagian dari budaya masyarakat mereka yang mempunyai andil signifikan dalam memberikan corak dan memposisikan kedudukan perempuan pada masyarakat. Ajaran agama atau religi memiliki potensi dominan dalam penerapan ideologi gender yang bias. Dalam konteks itu pula, agama bisa memberikan inspirasi dan dorongan munculnya ketidakadilan gender. Ketidakadilan tersebut sebenarnya bukan bersumber dari prinsip agama, melainkan karena proses perkembangan agama yang di dominasi oleh budaya patriarkat (Murniati. 2004: 5).

Berdasarkan perkembangan sejarah di Jepang, selain agama Buddha, kepercayaan Shinto, dan Konfusianisme sangat memengaruhi kehidupan masyarakat Jepang. Ketiga keyakinan tersebut, selain digunakan sebagai alat

pemersatu bangsa Jepang, juga dijadikan sebagai alat untuk melindungi dan mendukung otoritas Kaisar pada saat itu. Salah satu dampak terbesar dalam pengaruh ketiga keyakinan tersebut adalah dalam hal kedudukan perempuan Jepang (Herlina. 2011: 115).

Terdapat kepercayaan atas pemujaan Amaterasu, yakni dewa matahari yang berjenis kelamin perempuan. Pada saat itu perempuan dianggap memiliki kekuatan supranatural khusus, diberkahi kemampuan untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Oleh karena itu, masyarakat Jepang pada awalnya menganut sistem matrilineal, yaitu perempuan mempunyai kedudukan lebih dominan dalam mengambil keputusan (Roosiani, 2017: 72)

KESIMPULAN

Di Jawa Barat, sejarah Jugun lanfu merupakan salah satu peristiwa sejarah yang penting untuk di cari keberadaanya, Jugun lanfu menunjukkan bagaimana sejarah kelam perlakuan penjajah Jepang terhadap perempuan. Bertahun-tahun mereka hidup dalam belunggu lanjo, setiap hari tugas mereka melayani kebutuhan biologis tentara Jepang. Penganiayaan sudah menjadi hal yang lumrah bagi mereka jika melawan tentara Jepang yang menggunakan jasa mereka. Menjadi Jugun lanfu adalah adalah suatu pekerjaan yang harus mereka jalani dengan penuh terpaksa sampai Indonesia merdeka, setelah kemerdekaan Indonesia sebagian dari mereka kembali ke rumahnya masing-masing adapula yang mencari penghidupan baru.

Para korban yang tersebar di wilayah Jawa Barat seperti di daerah Cimahi, Sukabumi, Bogor, dan Sumedang. Berdasarkan testimoni-testimoni para korban Jugun lanfu, bahwa mereka seringkali menerima kekerasan-kekerasan seksual yang baik itu dilakukan oleh Tentara Jepang maupun para Perwiranya. Kekerasan tersebut dilakukan oleh Jepang sudah dimulai dari proses perekrutan para calon korban hingga sampai dengan mereka mendapatkan serangan-serangan brutal pada saat melayani hasrat nafsu para Tentara Jepang.

Tentara Jepang sudah melakukan perkosaan, perdagangan orang untuk tujuan seksual, eksploitasi sosial, penyiksaan seksual dan juga perbudakan seksual terhadap perempuan-perempuan remaja di Indonesia termasuk di Jawa Barat dan memberikan dampak traumatis bagi mereka yang mengalaminya baik itu secara fisik, dampak terhadap masyarakat dan juga psikologis korban Jugun lanfu tersebut.

Kisah Jugun lanfu pada masa pendudukan Jepang khususnya di Jawa Barat dan umumnya di Indonesia jarang muncul sebagai wacana publik dan catatan sejarah Nasional seperti halnya kasus Romusha. Terkesan ada pembiaran bahwa kisah perbudakan seksual oleh para tentara Jepang hanya menjadi rahasia Jugun lanfu

belaka. Padahal, penderitaan korban Jugun lanfu dialami sepanjang hidup mereka, baik secara fisik mengalami kerusakan permanen organ reproduksi akibat kekerasan seksual, secara psikologi mengalami trauma berkepanjangan, dan yang paling mengesankan adalah sanksi sosial yang harus diterima yaitu dicap sebagai perempuan bekas Jepang dan pelacur, yang sebenarnya bukan atas kemauan dan pilihan mereka sendiri. Selain itu, hal yang lebih menyakitkan bahwa perempuan korban Jugun lanfu adalah ketiadaan pengakuan dan permohonan maaf secara resmi dari Pemerintah Jepang atas kejahatan kemanusiaan yang dilakukan masa Perang Dunia II dan juga tidak mendapatkan perhatian dari Pemerintah Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I. (2013). Penelitian Berwawasan Gender dalam Ilmu Sosial. *Jurnal Humaniora* Vol. XV No. 3.
- Abdurahman, D. (2011). *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*. Yogyakarta: Ombak.
- Anwar, E. (2007). Ideologi Keluarga Tradisional "IE" dan Kazoku Kokka pada Masyarakat Jepang Sebelum dan Sesudah Perang Dunia II. *Jurnal Wacana* Vol. 9 No. 2, Oktober 2007.
- Bungin, B. (2008). *Konstruksi Sosial Media Massa: Kekuatan Pengaruh Media Massa, Iklan Televisi dan Keputusan Konsumen serta Kritik Terhadap Peter L. Berger dan Thomas Luckmann*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Depdikbud. (1977). *Sejarah Daerah Jawa Barat*. Jakarta: Depdikbud.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1996). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Herlina. (2011). Suatu Telaah Budaya: Agama dalam Kehidupan Orang Jepang. *Jurnal Al-Azhar Indonesia* seri Humaniora Vol. 1 No. 2, September 2011.
- Hindra & Kimura. (2007). *Momoye: Mereka Memanggilku*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Ibrahim, J. (2004). Eksploitasi Ekonomi Pendudukan Jepang di Surakarta (1942-1945). *Jurnal Humaniora* Vol 16 No.1, Februari 2004.
- Irawati, I. (2016). *Stratifikasi dan Mobilitas Sosial*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Iryana, W. (2016). Protes Sosial Petani Indramayu Masa Pendudukan Jepang (1942-1945). *Jurnal Patanjala* Vol. 8 No. 3, September 2016.
- Isnaeni & Apid. (2008). *Romusa sejarah yang terlupakan*. Yogyakarta: Ombak.
- Kurasawa, A. (2015). *Kuasa Jepang di Jawa: Perubahan Sosial di Pedesaan 1942-1945*. Depok: Komunitas Bambu.
- Lapian & Chaniago. (1998). *Dibawah Pendudukan Jepang: Kenangan Empat Puluh Dua Orang yang Mengalaminya*. Jakarta: ANRI.
- Legawa, W. (2009). Gerakan Politik Pada Masa Penjajahan Jepang. *Jurnal Sejarah dan Budaya*, No. 2, Desember 2009.
- Lubis, dkk. (2014). *Sejarah Banten: Membangun Tradisi dan Peradaban*. Banten: Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten.

- Lucas, A. (1989). *Peristiwa Tiga Daerah: Revolusi Dalam Revolusi*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Madji & Wahyudi. (2014). *Ilmu Sejarah: Sebuah Pengantar*. Jakarta :Prenada Media Group.
- Mariana, A. (2015). *Perbudakan Seksual: Perbandingan Antara Masa Fasisme Jepang dan Neofasisme Orde Baru*. Tangerang: Marjin Kiri.
- Marlina, I. (2006). *Kedudukan Wanita Menak Dalam Struktur Masyarakat Sunda: Studi Kasus Di Kota Bandung*. *Jurnal Sosiohumaniora*, Vol 8 No. 2, Juli 2006.
- Mikhrob, H & Khudari, M. (1993). *Catatan Masalalu Banten*. Serang: Penerbit Saudara.
- Murniati, N. (2004). *Getar Gender: Perempuan Indonesia Dalam Perspektik Agama, Budaya, dan Keluarga*. Magelang: Indonesiatara.
- Nagazumi, A. (1988). *Pemberontakan Indonesia di Masa Pendudukan Jepang*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Oktorino, N. (2013). *Konflik Bersejarah – Runtuhnya Hindia Belanda..* Jakarta: Gramedia.
- Onghokham. (1989). *Runtuhnya Hindia Belanda*. Jakarta: Gramedia.
- Poesponegoro, dkk. (2005). *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Purcell, H. (2014). *Fasisme*. Yogyakarta: Resist Book.
- Rahmah, Y. (2017). *Konsep Ie dalam Organisasi Sosial Masyarakat Jepang*. *Jurnal Kiryoku* Vol 1 No. 3.
- Roosiani, I. (2017). *Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat Jepang*. *Jurnal Wahana* Vol. 1 No. 13.
- Subono, I. (2000). *Negara dan Kekerasan Terhadap Perempuan*. Jakarta: Penerbit Yayasan Jurnal Perempuan.
- Sulasman. (2013). *Panasnya Matahari Terbit: Derita Rakyat Sukabumi Pada Masa Pendudukan Jepang 1942-1945*. *Jurnal Patanjala* Vol. 5 No. 3 September 2013.
- Suryono, R. (2005). *Seks dan Kekerasan Pada Zaman Kolonial*. Jakarta: PT. Grasindo.
- West & Zimmerman. (1987). *Doing Gender*. *Gender and Society* Vol. 1 No. 2 June 1987.
- Susanto, B. (2007). *Sisi Senyap Politik Bising*. Yogyakarta: Kanisius.
- Wulandari & Rahayu. (2015). *Konstruksi Gender Dalam Novel Utsukushisa To Kanashimi To Karya Yasunari Kawabata*. *Jurnal Metasastra*, Vol. 8 No. 2, Desember 2015.
- Yahya, H. (2004). *Menyingkap Tabir Fasisme (terj)*. Bandung: Dzikra.
- Zubaedah, S. (2010). *Mengurai Problematika Gender dan Agama*. *Jurnal Yinyang* Vol. 5 No. 2, Juli 2010.